

# AMERIKA SERIKAT & TANTANGAN ABAD Ke-21

Oleh: Dra. Suzie S. Sudarman, MA

**D**i tahun 90an, keberhasilan diplomatik yang perlu dicatat adalah pelestarian hubungan kerja sama antara negara-negara besar di dunia. Di saat itu pulalah bipolaritas masa Perang Dingin bergeser ke arah sosok kekuatan unipolar Amerika Serikat tanpa menimbulkan gejolak geopolitik yang terlalu berarti. Namun demikian, semenjak kita memasuki awal abad ke-21, muncul pula pertanyaan-pertanyaan mendasar, antara lain tentang ada tidaknya keteguhan kepemimpinan Amerika Serikat; atau kenyataan mengapa sampai merebak rasa kegeraman atas asumsi meluasnya campur tangan baik yang berkenaan dengan kekuasaan, kekuatan pasar, dan budaya Amerika Serikat atau persisnya dalam ungkapan John Ikenberry "The United States is a revisionist state seeking to parlay its momentary advantages into a world order in which it runs the show, a unipolar world in which no state or coalition could ever challenge it as global leader, protector, and enforcer." (2002)

Apakah tuduhan terhadap bangsa Amerika yang bertubi-tubi datangnya ini sungguh-sungguh beralasan? Ataukah kerisauan dan rasa was-was yang acap kali tak urung menyelinap ini justru lebih berkenaan dengan gejala-gejala yang muncul semenjak berakhirnya masa Perang Dingin, serta di saat-saat dunia beranjak memasuki awal abad ke-21? Bahwasanya bukan lagi sekedar tembok dan rezim yang ambruk porak poranda, namun tampaknya telah berguguran pula konsep-konsep besar yang lazim berlaku. Sebagai contoh adalah definisi Blok Timur dan Barat, negara Dunia Ketiga, liberal dan totaliter, penggentaran (*deterrence*) dan lain sebagainya. Para akhli pun hanya bisa menatap beraneka ragam perkembangan ini tanpa alat bantu konseptual yang disepakati secara kultural. Hal lain yang cukup signifikan adalah kenyataan bahwa macam-macam negara-bangsa pun telah kehilangan kedaulatannya dalam proses globalisasi yang



menggejolak di dunia. Tatapan global ini melanda dan menggoyahkan arus kehidupan sehari-hari, secara anarkis dan tidak menentu serta didorong oleh keniscayaan ekonomi, teknologi, dan budaya.

Para pengamat yang cenderung merujuk kepada peranan norma-norma dan budaya dalam tataran internasional, kurang memperhatikan masalah "*agency*" sehingga seringkali dapat menimbulkan kesalahan spesifikasi akan wujud mekanisme yang melahirkan perubahan yang tengah diselidiki (Pinnemore 1996).

Masalah yang akan saya jelajahi dalam kesempatan ini adalah bagaimana cara mengatasi ketakutan-ketakutan yang terlampau berlebihan akan sosok kekuatan Amerika Serikat, istimewa lagi adalah bagaimanakah caranya mengatasi gejala teori konspirasi anti Amerika Serikat yang sedang marak di Indonesia khususnya. Saya mencoba untuk berargumentasi bahwa pemikir-pemikir politik luar negeri Amerika Serikat sudah sejak lama berupaya meredefinisikan kepentingan nasionalnya agar selaras dengan dorongan-dorongan (*impulse*) moral bangsanya, atau yang menurut paparan John Ruggie disebutkan sebagai "*linking America's international project with its sense of self as a nation—serves as a sure source of insight.*" (1996)

Namun demikian, di tengah-tengah perubahan dunia yang memberdayakan pelaku-pelaku transnasional dan mendorong susutnya pengendalian oleh pemerintahan pusat, di Amerika Serikat sendiri pun sering muncul pertarungan antara sepasang kebijakan yang keduanya bersifat internasional, yakni *multilateralism vs unilateralism*. Apabila muncul masalah yang menjadi sumber kerisauan kelompok-kelompok politik di dalam negerinya, ataupun ketika tantangan keamanan nasionalnya membutuhkan tindakan pencegahan maka yang lazim muncul

adalah unilateralisme Amerika Serikat. Hal seperti ini sesungguhnya bisa dihindarkan melalui upaya pengembangan kenyataan di dalam negeri yang seperti ini sebagai sebuah model permainan dua tingkat (*two-level game modeling*). Hal itulah yang menjadi pusat perhatian Robert D. Putnam (1988). Model yang dirancangnya itu mencakup pula perilaku strategis yang muncul dari keterkaitan antara proses politik di dalam negeri, lembaga-lembaga, dan perjanjian internasional. Meminjam optik Anthony Giddens, yang telah terjadi adalah proses strukturasi (*structuration*) atau sebuah reproduksi struktur sosial secara terus menerus oleh “agent” yang sadar (*knowledgeable agents*) (Powell dan Di Maggio 1991).

### Visi Amerika Serikat tentang Tatanan Dunia yang bersifat Multilateral

#### Tatanan keamanan Internasional

Dalam kaitan geopolitik, memang belum pernah muncul sebuah negara besar seperti layaknya Amerika Serikat ini. Bagi Woodrow Wilson dan Franklin D. Roosevelt (FDR), yang paling selaras dengan sosok kepribadian bangsa Amerika adalah rancangan tatanan dunia yang bersifat multilateral. Pada dasarnya, konsep Amerika Serikat tentang komunitas politik bukanlah seperti kekhususan organik yang lazim muncul di negara-negara tradisional, namun lebih menyerupai sebuah bangunan yang universal yang bersifat terbuka bagi siapa pun yang berminat (Ruggie 1996).

Woodrow Wilson menganggap bahwa perdamaian dunia bisa muncul bilamana didukung oleh pemerintahan yang demokratis, perdagangan internasional yang bebas serta adanya organisasi internasional yang dapat menyelesaikan perselisihan dunia. Bagi Wilson maupun FDR, yang terpenting adalah memfokuskan keterlibatan internasional Amerika Serikat pada upaya mewujudkan prinsip-prinsip yang telah membentuk negaranya. Pendekatan multilateralisme ini tercermin dalam pandangan Roosevelt tentang lingkungan strategis dunia di saat itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun lahir dan Roosevelt dengan demikian mengharapkan akan terwujudnya mekanisme kerja sama antara kekuatan-kekuatan nasional di dunia.

#### Tatanan Perekonomian Internasional

Bagaimana pun halnya dengan pemikiran *heterodox* Roosevelt tentang keamanan kolektif, FDR juga berupaya menyalaskan sepasang kebijakan perekonomian yang bersifat kontradiktif ke dalam rancangan institusional yang bersifat campuran (*hybrid*) (Ruggie 1996). Rezim perekonomian yang dirancang memungkinkan secara serempak terwujudnya pasar terbuka di dunia internasional serta kebijakan perekonomian dalam negeri dengan otonomi yang luas. Tampaknya FDR

tidak menginginkan liberalisme *laissez faire* dengan standar emas dengan sistem pasar bebas, melainkan ia lebih cenderung kepada pendekatan multilateralisme yang dibarengi dengan intervensi di dalam negeri sebuah negara kapitalis modern (Ruggie 1996).

Perjanjian *Bretton Woods* mengungkapkan niatan Amerika Serikat ini untuk membuka perdagangan valuta yang bebas dan stabil dengan dua syarat. Kondisi pertama adalah terbukanya kemungkinan bantuan jangka pendek untuk membiayai defisit neraca pembayaran oleh IMF. Dan yang kedua, pemerintah tetap berhak mengawasi mobilitas modal di negaranya masing-masing (Ruggie 1996).

#### Kelanjutan Visi Multilateralisme Amerika Serikat Di masa Perang Dingin

Definisi keamanan Amerika Serikat senenjak tahun 1945 terus berubah-ubah. Berlangsungnya masa Perang Dingin juga menghalangi rencana HDR untuk mewujudkan sistem keamanan PBB yang bersifat kolektif (*concert-based*). Sekalipun demikian, komunitas keamanan di Eropa Barat telah menjadi kenyataan, berbeda dengan halnya di negara-negara Asia Timur.

Inti dari keteraturan dunia internasional setelah masa Perang Dingin—atau yang dikenal sebagai “sistem Amerika” ini—sesungguhnya di bangun di atas dua persetujuan berikut ini (Ikenberry 2001-2). Persetujuan pertama atau “*the ‘realist bargain’*” tumbuh semasa Perang Dingin. Amerika Serikat memberikan jaminan kepada negara-negara yang bersekutu dengannya, sebuah perlindungan keamanan serta akses ke pasar Amerika Serikat, teknologi dan pasokan barang dan jasa di dalam kerangka perkenomian dunia yang terbuka. Sebagai imbalannya, sekutunya pun siap memberi dukungan diplomatik, ekonomi, dan logistik bagi Amerika Serikat selama mereka tetap bersedia dipimpin oleh Amerika Serikat. Persetujuan kedua adalah “*the ‘liberal bargain’*” yang secara khusus berupaya menjawab rasa kekhawatiran akan sosok kekuasaan Amerika Serikat. Jelas bahwa Amerika Serikat pun kemudian memperoleh imbalannya berupa kesepakatan dunia internasional untuk hidup di bawah naungan sistem Amerika ini (Ikenberry 2001-2).

Komitmen untuk melakukan aksi bersama telah pula turut membentuk perilaku negara-negara besar di berbagai konflik regional. Sekalipun demikian tampaknya negara-negara berkembang kurang memperdulikan sistem operasi perdamaian kolektif PBB (*concert-based*). Tantangan yang terpenting muncul dari politik dalam negeri Amerika Serikat sendiri yang tampaknya merisaukan sistem komando pasukan PBB dan meragukan bahwa hal ini bisa dirancang untuk menjadi lebih efektif lagi.

### **Di Masa Pasca Perang Dingin**

Sekalipun tema-tema pasc Perang Dingin berkisar pada soal fragmentasi dan konflik, tatanan dunia ‘sistem Amerika’ ini pun mampu untuk terus bertahan dan tetap didukung kalangan negara-negara industri maju. Komponen tatanan ini wujudnya beraneka ragam, ada yang berbentuk aliansi keamanan, pasar terbuka, lembaga-lembaga multilateral, dan forum-forum konsultasi dan penadbiran. Keseluruhan elemennya dengan sengaja terus dipelihara dengan baik demi kepentingan bersama dan bersandar kepada sistem kapitalisme dan demokrasi.

### **Tantangan Abad ke-21**

#### **Dimensi Keamanan Internasional**

Tantangan keamanan internasional Amerika Serikat yang muncul di abad ke-21 lebih berkenaan dengan berbagai hal yang muncul akibat tekanan-tekanan demografi, lingkungan hidup serta masyarakat, tersebarunya aneka penyakit menular seperti AIDS, juga melandanya kriminalitas dan terorisme yang muncul sebagai ancaman yang sangat berbahaya (Kaplan 1994). Keterlibatan militer Amerika Serikat akhirnya pun bisa menjurus pada keterlibatan politik (Kaplan 2003) dan telah pula terbukti bahwa akan sulit untuk mendapatkan solusi atas konflik identitas yang berlangsung di sebuah negara tanpa memberlakukan intervensi sihak asing.

Akhir-akhir ini tampaknya sulit pula mencari pemecahan atas masalah keamanan yang bersumber pada kombinasi “asymmetry” dan pendekatan “idiosyncratic” dalam peperangan yang berlangsung di dalam era baru. Asimetri berarti tidak adanya cara untuk membandingkan, baik mengenai kualitas maupun operasionalnya (Meigs 2003). Idiosinkrasi berarti penggunaan pendekatan bukan ortodoks, atau cara-cara menerapkan kemampuan yang tidak terlampaui mengandalkan aturan main (Meigs 2003).

Tantangan keamanan zaman terorisme ini tidak terlampaui mengutamakan kadar simetri operasionalnya, yang menjadi acuan adalah apabila kemampuan militerlah yang sedang diuji. Jaringan teroris kini lebih mengutamakan perilaku idiosinkratik dalam menerapkan kemampuannya, baik di bidang militer maupun non-militer, tanpa disertai tanda-tanda bahwa konflik akan terjadi (Meigs 2003).

Untuk menyatakan, baik kemampuan konvensional maupun yang tidak konvensional guna menggentarkan kemampuan para teroris yang dapat memukul tatanan operasional dan strategis yang baru, perlu kreativitas yang tinggi. Sebuah koalisi internasional yang terbentuk untuk melawan terorisme selanjutnya juga akan membuka kemungkinan lebih jauh untuk terjadinya kompromi-kompromi kebijakan serta komitmen.

#### **Dimensi Stabilitas Perekonomian Internasional**

##### **Rezim Moneter:**

Perubahan-perubahan juga terjadi dalam kerangka rezim moneter dan perdagangan, yang di rancang oleh Amerika

Serikat itu. Amerika Serikat sendiri tampaknya kurang memberi perhatian kepada rezim moneter di tahun 1980an. Kini ada transaksi trilyunan dollar di pasar valuta, sebuah peningkatan yang luar biasa besarnya dibandingkan dengan di masa-masa sebelumnya. Ketidak seimbangan neraca pembayaran Amerika Serikat yang bertambah sebesar satu juta dollar per menit menandakan bahwa pertumbuhan ekspor negara-negara Asia pun akan segera berakhir (Choudury 2003). Defisit neraca pembayaran Amerika Serikat yang tumbuh sebesar 60 juta dollar per jam ini niscaya akan menimbulkan permasalahan perekonomian global (Choudury 2003). Selanjutnya proses liberalisasi juga menumbuhkan mobilitas modal yang pada akhirnya pun melemahkan instrumen kebijakan perekonomian yang tradisional.

##### **Rezim Perdagangan:**

Sekalipun terjadi pelanggaran-pelanggaran neoproteksionis dalam bentuk “process protectionism,” “managed trade,” “aggressive unilateralism,” dan “regionalism,” hal-hal seperti ini tidak terlampaui banyak mengubah visi multilateralisme dan liberalisme Amerika Serikat. Memang kerap terjadi konflik-konflik perdagangan seperti yang akhir-akhir ini muncul antara Amerika Serikat dan Vietnam seputar perdagangan iken lele. Timbul pula konflik karena adanya rezim perdagangan negara-negara Eropa yang anti produk pangan GM (*Genetically Modified*). Konflik pun muncul juga tentang diberlakukannya tariff atas produk besi baja oleh Amerika Serikat, hal ini akan membawa balasan sanksi tariff terhadap produk-produk tekstil, buah, dan sayuran Amerika Serikat. Pola pertumbuhan perdagangan “*intra-firm*” juga berpengaruh kepada instrumen tradisional. Namun ironisnya yang sering dilupakan dunia adalah bahwa Amerika Serikat telah secara terus menerus memberikan subsidi kepada perekonomian dunia, sebesar setengah triliun dollar per tahun yang apabila nantinya dikoreksi, akan secara pasti mengganggu pola transaksi perdagangan internasional yang telah menjadi sangat tergantung kepada pasar Amerika Serikat (Choudury 2003).

#### **Perimbangan Kemakmuran yang diatur secara Global dan Demokrasi di tingkat Domestik**

Di Amerika Serikat kepentingan negara itu banyak ditentukan oleh posisinya di dalam sistem internasional dan hal-hal yang terkonstruksi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang berhasil menguasai pemerintahan. Karenanya, keserasian hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara “republican” yang serupa, bisa tumbuh dengan baik. Dan tentunya jika apa yang sedang berlangsung itu hanya berada dalam konteks kadar interdependensi yang minimal (Doyle 2000), karena dalam kenyataannya ada prasyarat institusi dan hukum yang harus dipenuhi sebelum mekanisme pasar dapat berfungsi secara harmonis (Helleiner 2001). Diasumsikan pula bahwa kerawanan yang muncul dari kadar interdependensi minimal tidak akan mempersulit pemerintah dan mengurangi kadar

legitimasi system demokrasi liberal yang berlaku. Erosi bangunan yang telah ditata untuk memberikan perlindungan dalam negeri di Amerika Serikat dalam kaitannya dengan sistem perdagangan bebas memunculkan perdebatan baru. Pelaku-pelaku transnasional muncul dalam kevakuman pengaturan sistem multilateral dunia. Pola-pola konflik dan kerja sama yang kemudian terwujud dalam perkembangannya belum lagi jelas wujudnya. Yang pasti adalah organisasi non-pemerintah bisa mempenetrasi berbagai negara di dunia dan mampu untuk menggunakan konstituen di dalam negara-negara yang bersangkutan untuk kemudian menentukan agenda politiknya (Keohane and Nye 2001).

Sehubungan dengan upaya mewujudkan kesetaraan hubungan antar negara yang akhir-akhir ini ditandai oleh konflik antara kultur konsumen dunia dengan politik baru yang mengutamakan nilai-nilai moral dan spiritual, maka pemikiran-pemikiran yang berkembang tentang politik domestik dan kerja sama internasional perlu diperhatikan.

Yang jelas, di Amerika Serikat sendiri telah berlangsung berbagai perubahan penting. Masa Perang Dingin memunculkan keterlibatannya secara besar-besaran, pemerintahan Amerika Serikat yang semula sangat berperanan perlu ditata kembali sekalipun belum terdapat titik ekuilibrium yang bisa menjadi kesepakatan bersama. Sebagai akibatnya timbul perdebatan yang niscaya akan berpengaruh pada politik luar negerinya (Ruggie 1996).

Aliansi pemilihan umum Amerika Serikat juga berpengaruh. Jika masa pemerintahan FDR ditandai oleh negara-negara bagian Selatan Amerika Serikat yang dikuasai Partai Demokrat serta mendukung agenda internasional Amerika Serikat, kini negara-negara bagian ini telah bergeser ke Partai Republik. Sayap Wall Street partai Republik yang bersifat internasionalis kini semakin kurang berperan. Dampak semua hal tersebut di atas terwujud pada basis politik yang cenderung internasionalis yang semakin kurang bisa diprediksi (Ruggie 1996).

Yang menjadi sumber ketegangan baru di dalam negeri Amerika Serikat berkenaan dengan perang kultural yang terjadi semenjak akhir tahun 1960an. Kalangan pendukung multikulturalisme melihat Amerika sebagai proses sejarah aneka ragam kelompok diaspora. Tujuan untuk memperdalam makna hak individu berakhir dengan pelembagaan hak-hak untuk mendapatkan santunan (*entitlements*) bagi kalangan yang dianggap sebagai korban suatu keadaan tertentu (Ruggie 1996). Kemudian muncul pula tandingannya dari kalangan neokonservatif yang mendukung hak-hak sipil, mendukung terwujudnya kesempatan yang sama, serta ekspisionalisme Amerika Serikat. Secara beruntun, kalangan sosial kanan dan Kristen kanan pun mulai memainkan peranan dalam politik Amerika. Kini perdebatan antara berbagai kelompok yang ada di Amerika Serikat sudah mulai mereda dan mulai tampak kembali kenyataan bahwa "bangsa Amerika itu dibangun oleh warganya yang lebih menghormati masa depan bersama dibandingkan dengan masa lalunya" (*a civic nation...built and*

*sustained by people who honor a common future than a common past.*"). (Ruggie 1996)

### Kesimpulan

Jelas sudah dari uraian visi Amerika Serikat dan sejarah implementasinya bahwa rasa berang yang berlebihan terhadap Amerika Serikat kurang pada tempatnya. Karena pada dasarnya "*The rich hegemon will usually be unpopular, deservedly or not.*" (The Christian Science Monitor, 11 September 2002). Lagipula, gelombang globalisasi sering kali cenderung memunculkan dugaan akan akibatnya, atau bilamana hanya sekedar terkait, bisa jadi akhirnya dianggap sebagai penyebab atau penentu permasalahannya (Doran 2000).

Dि saat di mana dunia seakan senantiasa tercekat oleh rasa serba tidak pasti, dalam kegalauan konseptual, kebenaran hanyalah akan dapat diraih melalui pemahaman yang muncul di dalam sebuah *dialogue* yang bersifat persuasif. Aneka ragam bentuk percakapan antar bangsa menjadi kian efektif apabila pelaku-pelakunya bisa diasumsikan sebagai kalangan yang rasional, bersifat strategis, oportunistik, dan nyata-nyata mengindikasikan bahwa tidak seorang pun dapat memaksakan berlakunya sebuah perjanjian kerjasama tertentu. Andaikata pelaku-pelaku politik di tingkat domestik memang sepakat untuk mendukung sebuah perjanjian kerjasama internasional, proses ratifikasinya pun dengan sendirinya akan mudah diwujudkan.

Karena kekuasaan pun kini kian menumpuk di kalangan pelaku-pelaku non pemerintah, hal ini secara nyata akan berdampak kepada interaksi yang tidak di mediasi oleh negara. Pelaku-pelaku politik non pemerintah membuka kemungkinan maraknya rasa kesadaran politik masyarakat dan sering kali menjadi penentu perimbangan antara negara dan pasar. Distribusi kekuasaan ini pun akan berpengaruh kepada apa yang dianggap baik dan buruk dan bisa menumbuhkan komplikasi kekuasaan hierarkis pemerintahan sebuah negara.

Sebagaimana hal yang secara nyata berkembang di masa kini, akan menjadi teramat penting bagi negara-negara yang memiliki konsepsi warga negara dan negara yang bertentangan dengan yang berlaku serta bermakna dalam jaringan interdependensi yang kompleks untuk serta merta meletakkan pandangan yang bersifat saling bertentangan ini di dalam percakapan satu dengan lainnya. Agar terwujud kesejahteraan dunia yang sesungguhnya, fokus kepada "*agency*" dan proses yang memproduksi dampak "*isomorphic*" (kesetaraan) kultur dunia, dapatlah dipastikan akan mengungkapkan kontradiksi yang ada yang sebelumnya mungkin belum sepenuhnya disadari (Finnemore 1996).

Suzie S. Sudarman

Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika

Staf Pengajar Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika  
Universitas Indonesia

## Bibliography

**Choudhury, Amit Roy**, "End is Near for Asia's Export-led Growth," in *Business Times*, 14 August 2003.

**Doran, Charles, F.**, "Globalization and Statecraft," in *SAISPIHERE* (2000): 4-10.

**Doyle, Michael W.**, "A More Perfect Union? The Liberal Peace and the Challenge of Globalization," in *Review of International Studies* 26, Special Issue (December 2000): 81-94.

**Finnemore, Martha**, "Norms, Culture, and World Politics," in *International Organization* 50, no. 2 (Spring 1996): 325-470.

**Helleiner, Gerald K.**, "Markets, Polities, and Globalization: Can the Global Economy be Civilized?" in *Global Governance* 7, i 3 (July-September 2001).

**Ikenberry, G. John** "American Grand Strategy in the Age of Terror," In *Survival* 43, no. 4 (Winter 2001-02): 19-34.

**Ikenberry, G. John**, "America's Imperial Ambition," in *Foreign Affairs* 81, no. 5 (September/October 2002): 44-60.

**Kaplan, Robert D.**, "The Coming Anarchy," in the *Atlantic Monthly* (February 1994).

**Kaplan, Robert D.**, "A Tale of Two Colonies," in the *Atlantic Monthly* 291, no. 3 (April 2003): 46-54.

**Keohane, Robert O. and Joseph S. Nye**, Power and Interdependence, Third Edition: San Francisco: Longman, 2001.

**Meigs, Montgomery C.**, "Unorthodox Thoughts about Asymmetric Warfare," in *Parameters* XXXIII, No. 2 (Summer 2003).

**Milner, Helen V.**, Interests, Institutions, and Information: Domestic Politics and International Relations, Princeton University Press, 1997.

**Powell, Walter and Paul J. Di Maggio** (eds.), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago: The University of Chicago Press, 1991.

**Putnam, Robert D.**, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games," in *International Organization* 42, i 3 (Summer 1988): 427-460.

**Ruggie, John Gerard**, Winning the Peace: America and World Order in the New Era, New York Columbia University Press, 1996.

**PT. SURYA FASTER GROWING**

We Supply All Kinds of Fertilizer Organik & Anorganik

**JAKARTA:**  
Jl. Kesehatan Raya  
Jakarta 10160  
Phone : (62-21) 3853535  
Fax : (62-21) 3845693

Komp.RUKO RICO CEMPAKAMAS  
Blok B.22 Jl. Jend. Suprapto  
Jakarta Pusat  
Telp : (62-21) 428857 - 68  
Email : spower@pacific.net.id

**CABANG :**  
Jl.Gusti Lelang No 8  
Pontianak - Kalimantan Barat  
Telp. 0561 742532

Jl.Bougainville Utara E3 Blo.1  
Kompl. Balikpapan Baru - Balikpapan 76114  
Telp : 0542 . 872510, Fax : 0542 872511

*"Congratulation & Success To ASAI  
and SUPIA Magazine"*